PIDATO
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020, DAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Oleh :

Anies Baswedan, Ph.D

Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Senin, 2 Agustus 2021

Jml : 18 Hlm.
Sumber : BPKD, Bappeda, TGUPP

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda;
- Wakil Gubernur DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah:***

- ***Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;***
- ***Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.***

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya banggakan;

Saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan catatan penting yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan.

Pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Dewan merupakan wujud tanggungjawab bersama, dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance)*.

Eksekutif berupaya menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar, maka hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat *Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)* bersama Eksekutif.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan pertama, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang terkait dengan ***Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.***

Mengawali penjelasan, Eksekutif akan menjelaskan mengenai ***Laporan Realisasi Anggaran*** yang meliputi ***Pendapatan Daerah, Belanja Daerah*** dan ***Pembiayaan Daerah.***

Menanggapi saran dan apresiasi yang disampaikan ***Fraksi PKS*** dan ***Fraksi PDI-Perjuangan*** mengenai realisasi pendapatan daerah, dapat kami sampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2020 tercapai berkat dukungan dari legistlatif. Adapun terkait optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak daerah, ke depan akan terus dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Upaya Intensifikasi melalui Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah, Penyempurnaan dan kalibrasi data subjek dan objek pajak daerah, Pemeriksaan, *Law enforcement*, perubahan peraturan terkait Pajak Daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta Peningkatan koordinasi kelembagaan.

2. Upaya Ekstensifikasi melalui Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah, pendataan, dan data dari aplikasi *start-up*.

Menanggapi saran dari ***Fraksi Partai Demokrat***, kami sependapat bahwa pemberlakukan kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) perlu dilakukan penundaan mengingat kondisi ekonomi pada saat ini masih dalam fase pemulihan akibat pandemi Covid-19. Berkenaan dengan upaya optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), antara lain bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan mendorong pelaporan data transaksi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor secara elektronik.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menanggapi komentar, pertanyaan, saran dan apresiasi dari ***semua Fraksi*** mengenai realisasi Belanja Daerah, dapat saya jelaskan bahwa Eksekutif mempunyai komitmen untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam menyikapi potensi tidak tercapainya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, Eksekutif telah mengambil kebijakan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan pada terlaksananya program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, serta Kegiatan Strategis Daerah dengan memperhatikan kaidah tata kelola keuangan yang *prudent*, efisien, efektif dan akuntabel.

Menanggapi pertanyaan, dan saran dari ***Fraksi Partai Golkar***, ***Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi***

PAN, dan Fraksi PDI-Perjuangan mengenai Program Pengendalian Banjir dan Abrasi yang hanya terealisasi sebesar 74,52%, dapat kami sampaikan bahwa Pada tahun 2020, mayoritas pembangunan fisik masih dalam tahap perencanaan teknis dan pembebasan tanah untuk pembangunan sistem polder, pembangunan waduk maupun peningkatan kapasitas sungai makro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Rendahnya penyerapan program penanggulangan banjir di antaranya disebabkan oleh adanya kontraksi anggaran saat dimulainya pandemi Covid-19, pengadaan tanah untuk pengendalian banjir yang mengalami sedikit keterlambatan karena penyesuaian dokumen administrasi dan legal sesuai ketentuan peraturan, dan adanya keterlambatan proses pengiriman barang impor karena pandemi Covid-19. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan upaya penanggulangan bencana banjir melalui kegiatan pemeliharaan, di antaranya pelaksanaan pengerukan sungai/kali, waduk/situ/embung, melaksanakan program drainase vertikal, serta memastikan kesiapan pompa-pompa pengendali banjir dalam menghadapi musim hujan. Terkait dengan evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama akan dituangkan dalam kebijakan perencanaan yang akan di reviu secara berkala dalam periode waktu tertentu.

Menanggapi saran dari ***Fraksi Partai Golkar***, ***Fraksi PAN*** dan ***Fraksi PDI-Perjuangan*** terkait fasilitas pemakaman dan krematorium, saat ini selain menyelesaikan proses penataan dan pematangan lahan di TPU Rorotan juga dilakukan persiapan serta inventarisasi lokasi-lokasi yang dapat segera dilakukan pematangan lahan agar dapat segera digunakan dengan tetap memperhatikan peruntukan ruang serta kondisi sosial sekitar lahan. Pengadaan lahan untuk pemakaman, telah dilakukan di tahun 2020 dan akan di usulkan kembali pada tahun 2022. Terkait dengan pelayanan kremasi warga telah dilakukan koordinasi dengan Krematorium Cilincing dan kerja sama dengan krematorium Tegal Alur.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan tentang penerimaan hibah dari ***Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra*** dapat dijelaskan bahwa salah satu sumber penerimaan hibah adalah dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp.255,85 miliar yang terealisasi Rp.197,36 miliar atau 77,14% dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Dana Hibah Pariwisata terserap 77,14% pada kurun waktu yang terbatas setelah pengesahan APBD-Perubahan 2020. Pencairan dana hibah tersebut berdasarkan jumlah Industri Pariwisata, Hotel, dan Restoran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah.
2. Penggunaan dana hibah untuk kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas karena adanya penerapan protokol pembatasan ruang pertemuan.
3. Gagal salur terhadap 93 hotel dan restoran dikarenakan ketidaksesuaian data rekening di bank sehingga baru dapat disalurkan setelah dilakukan perbaikan data oleh penerima hibah.
4. Sisa Dana Hibah Pariwisata telah disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 30 Juni 2021 senilai Rp.58 miliar. Audit BPKP atas Dana Hibah Pariwisata telah selesai dilaksanakan dan rekomendasi hasil audit telah dilaksanakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ***Fraksi PAN*** atas apresiasi pada program pengembangan upaya kesehatan masyarakat yang sudah terealisasi optimal. Menanggapi saran terkait percepatan pembangunan transportasi umum, saat ini cakupan area layanan transportasi umum berbasis jalan sampai dengan bulan Juli 2021 telah mencapai 97,5% hal ini setara dengan 76,3% luas wilayah DKI Jakarta. Integrasi angkutan umum berbasis jalan sempat terhambat karena adanya *refocusing* subsidi PT Transportasi Jakarta sejak tahun 2020.

Mengenai pertanyaan dan komentar dari ***Fraksi PAN*** dan ***Fraksi Partai Gerindra*** tentang program JakWIFI Secara teknis

kami sudah melakukan *monitoring* melalui *dashboard* dan segera melakukan koordinasi jika terdapat gangguan. Implementasi JakWIFI saat ini diprioritaskan pada RW kumuh dan proses pengadaannya telah dilakukan melalui e-Katalog LKPP sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menanggapi saran ***Fraksi PAN*** dan ***Fraksi PKS*** tentang percepatan pembangungan ITF, dapat kami sampaikan bahwa saat ini penyelenggaraan ITF di DKI Jakarta dilaksanakan melalui skema penugasan kepada BUMD PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Adapun perkembangan penyelenggaraan ITF oleh PT Jakarta Propertindo antara lain telah dilaksanakan Proses pemenuhan pendanaan untuk memulai konstruksi ITF Sunter dan proses penyusunan Kajian Studi Kelayakan ITF Wilayah Barat. Sedangkan progres penyelenggaraan ITF Wilayah Timur dan Selatan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya saat ini berada dalam tahap pemilihan mitra kerja sama pembangunan ITF. Dalam rangka memperpanjang masa layanan TPST Bantargebang, saat ini DLH/Dinas Lingkungan Hidup tengah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah *Landfill Mining* dan *RDF Plant* di TPST Bantargebang sebagai salah satu alternatif fasilitas pengolahan sampah di DKI Jakarta.

Menanggapi ***Fraksi Partai Demokrat*** terkait pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Makro dan Mikro, Pembangunan FPSA Makro/Mikro dapat terealisasi sesuai *timeline* dengan mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan secara cepat dan tepat sesuai peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermaksud untuk membangun Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) dengan skala yang lebih kecil di tingkat kecamatan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya mengenai Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp.4,7 triliun dari

anggaran Rp.5,5 triliun atau sebesar 85,27% dapat dijelaskan bahwa BTT dialokasikan sebagai dana darurat untuk penanganan Covid-19 telah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pada bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada Tahun 2020 ketersediaan rumah sakit darurat Pemda belum dibutuhkan karena adanya dukungan Pemerintah Pusat atas RS Covid-19, RS Darurat Covid-19, dan hotel untuk isolasi mandiri. Sedangkan penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19 dilaksanakan dari pendanaan lain Pemerintah Pusat. Pendanaan lain tersebut berupa pemberian dana prakerja, dana bantuan kepada pelaku usaha mikro, dan penyaluran pinjaman PEN dari Kementerian Keuangan melalui Bank DKI dengan realisasi perputaran kredit senilai Rp.5,2 triliun kepada 9.949 debitur pada segmen bisnis korporasi, mikro, retail, dan consumer/konsumen.

Menanggapi ***Fraksi Partai Golkar*** tentang tenaga kesehatan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan tenaga Kesehatan dipenuhi melalui *open recruitment* tenaga professional Kesehatan, program internsip dan program PKL mahasiswa pendidikan tenaga Kesehatan;
2. Insentif Tenaga Kesehatan telah dibayarkan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan;
3. Penambahan Tenaga Vaksinasi telah dilakukan melalui kolaborasi dengan faskes jejaring Puskesmas, RS swasta, organisasi profesi tenaga Kesehatan dan relawan mahasiswa pendidikan tenaga Kesehatan;
4. Jaminan obat-obatan dan vitamin untuk isoman telah dilakukan melalui, program pemantauan isoman/ *telemedicine* oleh Puskesmas, Kemenkes, dan TNI AD.

Saat ini di DKI Jakarta telah terdapat penambahan bed RS sebanyak 5.201 isolasi dan 642 ICU, melalui proses Ekspansi RS

yaitu penambahan kapasitas di dalam RS dengan memanfaatkan ruang yang ada, Ekstensi RS yaitu penambahan kapasitas di luar bangunan RS untuk menambah kapasitas perawatan yang memiliki kualitas sama dengan perawatan di dalam RS, dan RS Lapangan yaitu membangun lokasi perawatan diluar RS.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian berikut, saya akan menjawab tanggapan Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan ***Pembiayaan Daerah***.

Menanggapi pertanyaan dari ***Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra,*** dan ***Fraksi PSI*** terkait dengan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang dianggap cukup besar, dapat kami jelaskan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5,17 triliun terdiri dari SiLPA yang telah ditetapkan peruntukannya atas Dana BLUD, BOS, dan PEN sebesar Rp.1,58 triliun dan SiLPA yang belum ditetapkan peruntukannya sebesar Rp.3,59 triliun. Pada SiLPA sebesar Rp.3,59 triliun termasuk Dana Cadangan Daerah sebesar Rp.1,47 triliun yang baru dapat dicairkan pada tanggal 30 Desember 2020 setelah adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak dapat diserap secara maksimal. Dana SiLPA tersebut digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan pada awal tahun 2021, terutama untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pembayaran hutang.

Menanggapi saran, komentar, dan pertanyaan dari ***Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat,*** kami menghargai masukan atas perubahan penggunaan Penyertaan Modal Daerah. Dalam hal terdapat rencana perubahan penggunaan Penyertaan Modal Daerah yang diusulkan oleh BUMD, persetujuan atas permohonan diberikan berdasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku berdasarkan kajian bahwa perubahan tersebut akan memberikan dampak ekonomi dan fungsi kemanfaatan umum yang lebih baik dari rencana semula.

Pada bagian berikut, saya akan menjawab pertanyaan, saran dan komentar Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan *Neraca*.

Menanggapi pertanyaan tentang kenaikan piutang pajak dari ***Fraksi PDI-Perjuangan*** dapat dijelaskan bahwa terjadi pelambatan pada sektor usaha dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga kemampuan membayar pajak pada masyarakat dan dunia usaha mengalami penurunan dan menyebabkan kenaikan piutang pajak.

Menanggapi pertanyaan tentang laporan keuangan BUMD, dapat dijelaskan bahwa persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Grahasahari Suryajaya adalah sebesar 8,08%. BUMD yang tidak menyampaikan laporan keuangan *audited* 2020 yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol dan Perumda Pasar Jaya disebabkan karena belum selesainya proses audit, sedangkan pada PT Ratax Armada karena sudah tidak beroperasi. Penerimaan deviden dari BUMD berhubungan dengan kinerja keuangan masing-masing BUMD.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Menanggapi komentar dan pertanyaan terkait hasil pemeriksaan BPK dapat kami jelaskan bahwa atas seluruh temuan telah dilakukan tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi BPK, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan bayar pada pembelian paket pengadaan alat mobil pemadam telah ditindaklanjuti dan dikembalikan ke Kas Daerah;
2. Kelebihan Pembayaran pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) gedung sekolah sudah dikembalikan oleh Penyedia ke Kas Daerah;
3. Berkenaan dengan pemutakhiran data kepesertaaan PBI dilakukan usaha pemadanan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Daerah, Penerima Bantuan

Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) APBN, dengan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial;

4. Terkait penatausahaan Konstruksi Dalam Pengerjaan, telah dilakukan pendalaman dalam rangka meningkatkan kualitas informasi tentang Barang Milik Daerah pada laporan keuangan;
5. Terkait dengan Kewajiban kompensasi rumah susun, telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan Instruksi Sekretaris Daerah guna melakukan percepatan penerbitan Izin Prinsip Konversi Rumah Susun Murah;
6. Terkait kelebihan pembayaran Insentif Tenaga Penunjang Kesehatan senilai Rp.6,5 miliar telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp.3,8 miliar.
7. Terkait Pekerjaan Jasa Pemeriksaan Laboratorium, Pekerjaan Pengadaan Viral Transport Medium, dan Penunjukkan Langsung dalam pengadaan *Rapid Test Antibody* pada Dinas Kesehatan telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah;
8. Terkait temuan BPK tentang Pemborosan atas Pengadaan *Rapid Test* Covid-19 dan Pengadaan Respirator N95 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Sehubungan dengan ditundanya penyelenggaraan musim ke 6 Formula E karena pandemi Covid-19 pada beberapa kota penyelenggara termasuk Jakarta, maka telah dilakukan penghentian segera atas penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara Formula E telah melakukan renegosiasi dengan pihak Formula E Operations (FEO) mengenai penegasan dan kejelasan status keberlanjutan kerja sama, waktu pelaksanaan, serta status pendanaan yang telah dibayarkan. Hasil renegoisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atas dana *commitment fee* yang telah direalisasikan akan tetap dapat digunakan sebagai syarat penyelengaraan even Formula E yang tertunda karena pandemi Covid-19 dan selanjutnya disepakati akan dituangkan dalam addendum perjanjian;
2. Pembayaran *commitment fee* untuk penyelenggaraan Tahun 2022 dan seterusnya akan dilakukan penjadwalan kembali setelah adanya kepastian Penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan telah berakhirnya pandemi Covid-19.

Saat ini PT Jakarta Propertindo juga sedang melakukan kajian tentang studi kelayakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan pada pelaksanaan *event* Formula E dengan adanya pandemi Covid-19. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong PT Jakarta Propertindo dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan agar dapat mencari sumber pendanaan alternatif dan akan dilakukan perumusan opsi untuk memperoleh pembiayaan mandiri serta rencana pengelolaan pendapatan dari penyelenggaraan Formula E.

Menanggapi ***Fraksi PKB-PPP*** tentang ancaman kenaikan permukaan air laut dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki strategi pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui Penanaman Mangrove, Program Kampung Iklim, dan Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat.

Menanggapi ***Fraksi Partai Demokrat*** terkait penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk upaya yang dilakukan adalah memberikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kelurahan, pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang beranggotakan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), dan bekerjasama dengan pihak lain untuk mengatasi kendala penyediaan lahan pos pemadam tingkat kelurahan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan ***Raperda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022.***

Mengawali penjelasan, Eksekutif akan menanggapi ***Fraksi PDI-Perjuangan*** dan ***Fraksi PSI,*** dapat saya jelaskan bahwa proses perubahan RPJMD sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan telah melalui tahapan konsultasi Rancangan Awal dengan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dapat saya tegaskan kembali bahwa komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah dalam mewujudkan visi, misi, dan janji kerja. Indikator-indikator yang mengalami perubahan telah dibahas secara intensif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan pakar, instansi yang kompeten, dan *stakeholders* lainnya agar tetap objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun target tahun 2018 dan 2019 tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya, menanggapi ***Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS*** dan ***Fraksi Partai Gerindra*** terkait fokus Perubahan RPJMD, Eksekutif sependapat bahwa Perubahan RPJMD difokuskan kepada penanganan pandemi Covid-19 dengan tetap mendorong pelaksanaan program-program prioritas. Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan alternatif, antara lain melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pendanaan sebesar Rp.2,664 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp.3,192 triliun untuk program peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, transportasi, pariwisata dan kebudayaan, olahraga, serta penyediaan infrastruktur Kota Cerdas. Keberlangsungan pelaksanaan program

prioritas tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan penggunaan komponen dalam negeri sehingga berkontribusi pada pemulihan perekonomian.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya saya akan memberikan tanggapan terkait Pengendalian Banjir sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh ***Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PAN*** dan ***Fraksi PSI,*** yang dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pengendalian banjir tetap menjadi prioritas pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, dimana konsep naturalisasi dan normalisasi dilakukan secara sinergis dalam upaya merevitalisasi kali, sungai, kanal, waduk, situ dan saluran makro untuk menjaga kapasitas badan air sesuai dengan kebutuhan agar berfungsi optimal.

Dalam upaya pengendalian banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat yang diantaranya melalui pengadaan lahan sungai yang prioritas lokasinya telah disepakati bersama. Selain itu, meskipun di tengah keterbatasan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengedepankan keterlaksanaan program pengendalian banjir berupa pengadaan tanah badan air, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pengendali banjir berupa sistem polder, waduk, tanggul pantai, sistem drainase, dan drainase vertikal yang dibiayai melalui program pinjaman daerah PEN.

Selain itu, untuk mengoptimalkan upaya pengendalian banjir non struktural, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dan mendorong pelibatan multisektor untuk memperkuat upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan resiko bencana iklim termasuk banjir serta mendorong perubahan perilaku masyarakat diantaranya melalui 14 kanal Aduan Masyarakat melalui aplikasi JAKI, kolaborasi dengan masyarakat dan Organisasi Profesi dalam pembangunan drainase vertikal, pelibatan warga

masyarakat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Taman Maju Bersama seperti terbangunnya kolam retensi di TMB Papyrus, serta terus meningkatkan program kolaborasi bersama dalam hal pengendalian banjir di Kota Jakarta.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan ***Fraksi PKS*** terkait mewujudkan Jakarta sebagai kota yang berketahan, dapat saya jelaskan bahwa prinsip-prinsip yang membentuk ketahanan suatu kota adalah:

1. Kota yang siap dan mampu melakukan mitigasi dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan dan tekanan termasuk resiko bencana dan perubahan iklim;
2. Kota yang menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan air bersih, sanitasi dan kesehatan;
3. Kota yang mempromosikan konektivitas dan mobilitas warga melalui penyediaan transportasi publik dan sistem komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh warga.

Atas tiga prinsip ketahanan kota tersebut, Eksekutif memastikan bahwa program-program seperti pengendalian banjir, pembangunan tanggul rob, peningkatan layanan air bersih, pengelolaan sanitasi dan persampahan, serta penyediaan sarana prasarana kesehatan tetap menjadi prioritas hingga 2022. Program JakWiFi dan pengembangan infrastruktur kota cerdas yang merupakan konsep baru merespon kondisi pandemi menuju *new normal* adalah bentuk komitmen eksekutif untuk menjadikan Jakarta, kota yang tetap dapat tumbuh dan lebih berketahanan.

Terhadap komentar dari ***Fraksi PKB-PPP, Fraksi PAN*** dan ***Fraksi Partai Demokrat*** tentang penyediaan ruang terbuka hijau, dapat saya sampaikan bahwa target penambahan RTH per tahun dirancang dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan pendanaan APBD. Untuk tahun 2021 dan 2022 ditargetkan penambahan lahan RTH sebesar 0,0181 persen atau sekitar 12 Hektar per tahun yang didapat melalui pembelian atau

pengadaan lahan milik masyarakat dengan APBD serta penagihan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang sebagai insentif-disinsentif perizinan tata ruang. Beberapa upaya lainnya yang diterapkan termasuk di antaranya pengembalian fungsi jalur hijau di tepian badan air dan waduk melalui program naturalisasi dan peningkatan keterpaduan hijau dan biru, pengembangan jalur hijau sepanjang sisi trotoar, penanaman mangrove di kawasan pesisir, pengembangan ruang hijau seperti kanopi, dinding, atap hijau serta meningkatkan kolaborasi dengan sektor privat dan masyarakat untuk penyediaan RTH publik. Demikian juga komitmen Pemprov untuk memastikan ketersediaan RTH Makam untuk masyarakat, termasuk antisipasi terhadap tingginya permintaan di kondisi pandemi ini.

Selanjutnya menanggapi pandangan dari ***Fraksi Partai NasDem, Fraksi PSI,*** dan ***Fraksi PDI-Perjuangan*** tentang jumlah perumahan layak huni, dapat saya jelaskan bahwa pada penilaian BPS disebutkan bahwa pada tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta memiliki 2.717.575 rumah layak huni. Namun begitu, penurunan jumlah rumah layak huni pada tahun 2019 dikarenakan adanya penyesuaian kriteria yang digunakan oleh BPS sehingga menjadi 944.858 rumah layak huni. Hal ini menyebabkan penurunan rasio perumahan layak huni dari 99,36 persen menjadi 34,25 persen. Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni melalui program penyediaan rusunawa yang akan kita tuntaskan komitmen penyelesaiannya secara *Multiyears* yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Sementara penyediaan rusunami akan terus diakselerasi guna mengoptimalkan capaian kepemilikan unit hunian melalui Pengembang BUMD, BUMN, dan Swasta. Sejalan dengan hal itu, penyaluran fasilitas kredit kepemilikan hunian melalui Bank Pelaksana akan terus dikembangkan termasuk opsi pembiayaan lain melalui kolaborasi dengan para pengembang perumahan, lembaga keuangan/pembiayaan dan pihak-pihak lainnya.

Menanggapi Saran ***Fraksi PAN*** terkait dengan pengurangan sampah hingga 30 persen, dapat disampaikan bahwa Eksekutif sependapat terkait pentingnya pengurangan sampah di sumber. Hal ini menjadi satu hal yang strategis untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat serta membangun paradigma baru pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pengurangan, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah, sebagaimana amanat dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Selain itu, pembangunan FPSA skala mikro di sejumlah lokasi di Jakarta juga diharapkan dapat mereduksi jumlah sampah dan dapat mengurangi beban TPST Bantargebang yang hampir mencapai kapasitas optimumnya.

Terhadap komentar ***Fraksi PSI,*** dapat Eksekutif jelaskan bahwa rencana pembangunan LRT Jakarta dilakukan sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Rencana LRT Jakarta dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi yang terus dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Penyesuaian yang dilakukan terhadap rencana pembangunan LRT Jakarta adalah rencana LRT Jakarta Jakarta International Stadium (JIS) - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai untuk menjadi LRT Jakarta JIS - Kelapa Gading dan Velodrome - Klender.

Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Dukuh Atas telah dilayani oleh MRT Jalur Selatan - Utara dan LRT Jabodebek, serta Manggarai yang merupakan jaringan *commuter line* yang akan dikembangkan sebagai Manggarai Ultimate, sehingga rencana pembangunan LRT Jakarta diarahkan sebagai upaya peningkatan kinerja layanan dari sisi *ridership* dan sekaligus menciptakan koneksi layanan timur dan barat dengan layanan utara dan selatan pada bagian timur wilayah DKI Jakarta. Beriringan dengan proses perubahan RPJMD ini, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta terus melakukan sinkronisasi kebijakan dalam hal rencana pembangunan LRT Jakarta antara lain melalui usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang telah disampaikan pada bulan Mei 2021 kepada Kemenko Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan juga secara paralel terhadap proses evaluasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018.

Menanggapi Saran ***Fraksi Partai Demokrat*** dan ***Fraksi PAN***, Eksekutif sependapat untuk mendukung pelaku usaha kecil menengah yang terdampak pandemi. Strategi yang dilaksanakan antara lain: pemberian bantuan sosial, relaksasi kredit dan pembayaran retribusi, berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan *e-commerce* untuk pelatihan *online* dan pemasaran, berkolaborasi dengan *fintech* untuk penyaluran pinjaman modal tanpa bunga dan penyelenggaraan bazaar *online*.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap ***Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;*** *dan* ***Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.*** Sekali lagi saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan atas perhatiannya menyimak penjelasan yang saya sampaikan dengan penuh kesabaran dan seksama.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan Kota Jakarta serta dalam menangani pandemi dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 2 Agustus 2021
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Anies Baswedan, Ph.D